

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap negara memiliki tanggung jawab penting dalam menanggapi berbagai masalah yang muncul. Setiap masalah yang dihadapi oleh suatu negara akan berbeda dan cara meresponnya juga akan beragam. Dalam dinamika sosial yang terjadi di berbagai negara, Dinas Sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menangani berbagai masalah yang muncul di masyarakat. Setiap negara memiliki tantangan dan masalah yang berbeda-beda, yang membutuhkan respons yang sesuai dari pemerintah dan lembaga sosial. Salah satu metode yang sering digunakan adalah melalui program rehabilitasi sosial. Dua tanggung jawab utama pemerintah negara bagian adalah meningkatkan kesejahteraan umum (kemakmuran) dan membangun keamanan. Oleh karena itu, pemerintah diharuskan untuk menyiapkan berbagai layanan publik, termasuk yang dikelola oleh pemerintah dan yang diselenggarakan oleh sektor swasta dan masyarakat lainnya (masyarakat sipil). Untuk melaksanakan pemerintahan dan layanan publik (layanan publik), tiga elemen terakhir pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil saling terkait erat (Andari, 2020).

Untuk mencapai taraf hidup yang layak, kemiskinan merupakan masalah yang multisektoral dan memiliki berbagai macam ciri. Masalah ini harus segera ditangani secara komprehensif, menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang “Penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa Negara bertanggungjawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan serta fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat.” Melalui kebijakan, program, inisiatif pemberdayaan, dukungan, dan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat menangani kemiskinan secara tepat sasaran, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam menangani masalah sosial, kebijakan sosial berperan penting dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan berbagai

masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan sosial melibatkan identifikasi masalah sosial, analisis akar permasalahan, perumusan strategi dan rencana tindakan, pemberian pelayanan sosial kepada individu. Tujuannya adalah mencapai kesejahteraan sosial dengan merancang langkah-langkah strategis yang tepat sesuai dengan masalah yang ada (Alam, 2009).

Terdapat banyak aspek yang berbeda dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk faktor pembangunan, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu hal yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengurangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan pengaruhnya dengan memberikan bantuan, baik dalam bentuk dukungan finansial atau bantuan langsung, dukungan material dalam bentuk produk, atau pemberdayaan masyarakat. Diharapkan bantuan yang diberikan akan menurunkan tingkat ketimpangan sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan masyarakat setempat. (Ramadhianto, 2013).

Jika kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi, mereka dapat hidup bermartabat, memiliki kesempatan untuk tumbuh sebagai manusia, dan memenuhi tanggung jawab sosial mereka. Keadaan ini dikenal sebagai kesejahteraan sosial. Upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial melibatkan berbagai strategi dan pendekatan, termasuk rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk membantu individu yang mengalami masalah sosial agar dapat kembali berfungsi dan berkontribusi dalam masyarakat. Selain itu, perlindungan sosial merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa warga negara dilindungi dari risiko sosial dan mendapatkan akses terhadap jaminan keamanan, seperti perlindungan terhadap kekerasan, penyalahgunaan, dan diskriminasi. Pemberdayaan sosial juga menjadi aspek kunci dalam mencapai kesejahteraan sosial, dengan memberikan individu dan kelompok masyarakat keterampilan, pengetahuan, dan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan kondisi hidup mereka. Selain itu, jaminan sosial dalam bentuk program juga berperan dalam menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan perlindungan finansial. Semua ini merupakan komponen yang saling terkait dan saling memperkuat

dalam usaha mencapai kesejahteraan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Masalah-masalah terkait kesejahteraan sosial yang telah disebutkan masih merupakan tantangan yang dihadapi di berbagai kota di Indonesia. (Nuriana, 2017).

Sementara orang miskin tinggal di rumah yang tidak layak huni, kesejahteraan sosial perumahan terkadang disebutkan sebagai salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan saat menetapkan kriteria kemiskinan. Kenyataannya, orang miskin di Indonesia masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akan rumah yang layak huni. Salah satu penyebabnya adalah pendapatan keluarga yang sedikit, yang sebagian besar digunakan untuk menutupi biaya harian yang penting termasuk makanan dan minuman, sekolah, dan perawatan kesehatan. Sehingga tidak ada lagi uang yang tersedia untuk membangun rumah mereka.

Salah satu kebutuhan sosial mendasar yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat atau individu adalah tempat tinggal. Di satu sisi, permintaan akan pasokan perumahan tidak dapat sepenuhnya terpenuhi karena urbanisasi yang tak terelakkan dan perubahan kondisi global. Kemudian, masalah tambahan yang ditimbulkan oleh urbanisasi dunia yang cepat adalah meningkatnya masalah keterjangkauan atau daya beli di antara kelompok berpenghasilan rendah, yang memengaruhi semua orang di negara maju dan berkembang. Diperkirakan 828 juta orang miskin di negara berkembang, tinggal di daerah kumuh dan perumahan yang tidak memadai. (Christy, 2021).

Kepala keluarga berpenghasilan tinggi sering kali memiliki akses mudah ke perumahan melalui pasar swasta resmi, yang sangat mengakomodasi kebutuhan mereka. Namun, untuk mendapatkan perumahan yang layak, sejumlah besar rumah tangga berpenghasilan rendah sebagian besar bergantung pada bantuan pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan yang signifikan untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat mereka melalui kebijakan perumahan. Mengenai jenis bantuan perumahan yang ditawarkan, setiap negara tidak diragukan lagi memiliki kebijakannya sendiri yang disesuaikan dengan keadaan politik, ekonomi, dan sosial-historis negara tersebut. Bentuk bantuan pemerintah yang paling populer sering kali dalam bentuk

pinjaman bunga rendah, keringanan pajak dan voucher, perumahan sosial, pembiayaan bunga rendah, infrastruktur, dan perencanaan bagi pengembang perumahan yang terjangkau. Mayoritas penduduk Indonesia, yang terus mengalami kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, pengangguran, dan gaji yang buruk, akhirnya mencari perumahan atau membangun rumah dengan sumber daya yang mereka miliki, yang mengarah pada munculnya dan pengembangan perumahan yang tidak dapat digunakan atau kumuh. Pemerintah Indonesia meluncurkan program sejuta rumah sebagai respons terhadap keadaan perumahan yang mengerikan yang dihadapi oleh keluarga berpenghasilan rendah di negara ini. Salah satu inisiatif turunan program ini adalah pembangunan rumah layak huni. Salah satu program nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah adalah program Sejuta Rumah, yaitu program penyaluran rumah layak huni di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kemudian disalurkan melalui masing-masing provinsi untuk dilakukan pembangunan. Dengan pembangunan semacam ini, masyarakat miskin dapat lebih fokus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada memikirkan biaya pembangunan atau sewa rumah. (Rizanna et al., 1 C.E.)

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17/HUK/ 2023 tentang Data Terpadu kesejahteraan sosial bulan Januari Tahun 2023 di Kota Batu jumlah keluarga miskin dalam kategori cukup tinggi yakni sejumlah 26.893 KK yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan Kota Batu meliputi: Kecamatan Batu 12.224 KK, Kecamatan Junrejo 5.719 KK dan Kecamatan Bumiaji 8.942 KK. Dalam rangka Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Pemerintah Kota Batu wajib memberikan dukungan sosial kepada masyarakat tidak mampu agar dapat tetap terpelihara kesejahteraannya, kemampuan sosial ekonominya, serta terpenuhi haknya atas rumah yang layak dan lingkungan hidup yang sehat.

Problematika kesejahteraan sosial juga terjadi di Kota Batu, yakni salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Meskipun Kota Batu menghasilkan pendapatan yang tinggi melalui pariwisata dan investasi, namun kenyataannya

masalah kesenjangan sosial tetap ada di tengah-tengah masyarakat. Banyaknya masyarakat Kota Batu yang mengalami permasalahan ekonomi menyebabkan tidak bisa terpenuhinya kebutuhan yang mengakibatkan terganggunya kesejahteraan sosial. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu kembali melaporkan penerima bantuan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2022. Sebelumnya, Dinas Sosial Kota Batu melaporkan telah menerima 201 KPM penerima program RTLH. Selanjutnya, sebanyak 214 KPM dalam P-APBD ikut menerima program RTLH. Angka tersebut berasal dari usulan pokir DPRD Kota Batu sebanyak 159 KPM dan hasil pendataan 42 KPM dari organisasi masyarakat desa/kelurahan di Kota Batu. Dengan demikian, jumlah KPM penerima program RTLH bertambah sebanyak 13 KPM, sehingga totalnya menjadi 214 KPM. (Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2021).

**Tabel 1. 1 Jumlah RTLH di Kota Batu tahun 2022**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH RTLH
1	Batu	Oro-oro Ombo	7 unit
		Pesanggrahan	20 unit
		Sisir	18 unit
		Sidomulyo	15 unit
		Ngaglik	9 unit
		Songgokerto	9 unit
		Temas	11 unit
2	Bumiaji	Bulukerto	2 unit
		Bumiaji	7 unit
		Giripurno	5 unit
		Gunungsari	5 unit
		Pandanrejo	5 unit
		Punten	5 unit
		Sumberbrantas	12 unit
		Sumbergondo	1 unit
		Tulungrejo	11 unit
3	Junrejo	Beji	13 unit
		Junrejo	9 unit
		Mojorejo	8 unit
		Pendem	5 unit
		Tlekung	6 unit
		Torongrejo	8 unit
		Dadaprejo	8 unit

Sumber Dinas Sosial Kota Batu

Dari Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa Kota Batu, yang terkenal dengan potensi wisatanya dan sering dikunjungi oleh wisatawan, masih menghadapi tantangan dalam bidang kesejahteraan sosial. Namun demikian, data di atas menunjukkan bahwa untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang menghuni rumah tidak layak huni, maka jumlah rumah tidak layak huni di Kota Batu perlu dikurangi dengan bantuan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Dalam penelitian ini Kelurahan Sisir dipilih karena lokasinya berada di pusat Kota. Terlihat juga pada data diatas di Kelurahan Sisir ada sebanyak 18 unit rumah yang termasuk dalam kategori tidak layak huni.

Tahun 2023 Dinas Sosial mencatat adanya sebanyak 160 penerima bantuan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sudah berkurangkanya jumlah rumah tidak layak Huni di Kota Batu. Selanjutnya di tahun 2024 Pemerintah Kota Batu akan merenov sebanyak 97 unit rumah tidak layak huni. Namun, pada tahun 2024 ini mengalami perpindahan tanggung jawab dari Dinsos ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Disperkim), sehingga membua program ini berhenti sementara.

Peraturan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia secara rinci diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 24 ayat 1 dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial berada di tangan pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat, yang diwakili oleh Menteri, bertanggung jawab pada tingkat nasional, sementara tanggung jawab pada tingkat daerah dijalankan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota. Selain itu, Pasal 31 dalam undang-undang yang sama menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kesejahteraan sosial. Kerjasama ini menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang komprehensif dan terintegrasi di Indonesia (Aswidiyanto & Soedjarwo, 2020).

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan bagi Keluarga Penerima Manfaat di Kota Batu, Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Sosial Kota Batu telah mengimplementasikan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang bertujuan mendukung perbaikan

kondisi lingkungan agar lebih layak. Program Rehabilitasi ini merupakan inisiatif dari Dinas Sosial Kota Batu yang pengusulannya dari Desa/Kelurahan dan Dewan Perwakilan. Keputusan penempatan dan alokasi dibuat sesuai dengan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diperoleh dari aspirasi masyarakat dan usulan pokir. Agar terwujud keberfungsian sosial bagi individu, kelompok, dan masyarakat, pekerja sosial berupaya memecahkan masalah sosial. Tentu saja, mereka melakukannya dengan menerapkan prinsip-prinsip berbasis hak asasi manusia dan teori-teori yang berlandaskan kuat, sehingga setiap tugas yang mereka ambil diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada. Selain memberdayakan kelompok masyarakat yang sudah ada untuk menggunakan keterampilan profesional mereka guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka, pekerjaan sosial berupaya mengembangkan kapasitas masyarakat dalam upaya mengatasi masalah sosial. (Indraningrum et al., 2021).

Merehabilitasi properti yang sudah ada meliputi perbaikan, peningkatan, penggantian, penambahan, dan perubahan. Melalui tindakan pemilik dan penegakan hukum, rehabilitasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang rusak. Kenyataannya, seperti yang dinyatakan dengan baik, lebih murah secara ekonomi dan dapat ditingkatkan lebih cepat daripada membangun kembali. (Nagaring, 2021).

Program Rehabilitasi RTLH diharapkan dapat meningkatkan kohesi sosial dan memulihkan fungsi sosial keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting bagi para peneliti. Karena program Rehabilitasi RTLH merupakan prasyarat bagi Keluarga Penerima Manfaat untuk memenuhi kebutuhan perumahannya, para peneliti berpendapat bahwa penelitian ini penting. Diharapkan analisis dalam pembahasan ini menyoroti perlunya melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam proses perencanaan dan perumusan program, yang didasarkan pada semangat persatuan, gotong royong, dan nilai-nilai solidaritas sosial, dalam konteks tujuan penelitian. Hal ini berfungsi sebagai stimulan dalam koridor bantuan Rehabilitasi RTLH, yang memungkinkan keluarga dan masyarakat untuk memanfaatkan semua sumber daya mereka termasuk sumber daya manusia, yang meliputi tenaga, uang, dan pikiran, serta sumber daya alam, yang meliputi sungai, batu, dan pasir, dan sumber daya sosial,

yang meliputi kearifan lokal untuk membantu diri mereka sendiri. untuk mengevaluasi efektivitas dan keuntungan dari dukungan Rehabilitasi RTLH. Aturan keberhasilan program Rehabilitasi RTLH memberikan batasan pada kemampuan peneliti untuk mengamati bagaimana masyarakat menanggapi dan dipengaruhi oleh program dukungan. Penelitian tersebut setidaknya menunjukkan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan program, solidaritas sosial dan kerja sama timbal balik harus diperhitungkan dalam kerangka kemandirian masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas maka rumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui “Bagaimana efektivitas Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga penerima Manfaat di Kota Batu?.”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami secara mendalam bagaimana program Rehabilitasi Sosial diterapkan dalam upaya pemberdayaan bagi Keluarga Penerima Manfaat di Kota Batu. Dalam hal ini, penelitian akan menganalisis strategi, kebijakan, dan langkah-langkah yang diambil dalam implementasi program tersebut.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memiliki nilai signifikan dalam meningkatkan pemahaman ilmiah tentang efektivitas pelaksanaan program dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dalam upaya pemberian bantuan social terhadap KPM.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Sosial dan Pemerintah Kota Batu untuk meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selain itu, hasil kajian penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Batu dalam pemberdayaan bagi KPM.

### **1.4.3 Manfaat Akademis**

Manfaat akademis dari penelitian ini memiliki nilai yang signifikan dalam konteks meraih gelar Sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan. Penelitian ini berperan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa guna menyelesaikan kurikulum studi mereka. Dalam upaya meraih gelar Sarjana, penelitian ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang sedang mereka teliti. Proses penelitian memfasilitasi penerapan metodologi ilmiah, analisis data, serta menghasilkan temuan atau penemuan yang memberikan kontribusi pada bidang Ilmu Pemerintahan. Tambahan pula, penelitian ini turut memperluas wawasan mahasiswa dan memperdalam pemahaman mereka terhadap teori dan praktik dalam bidang studi yang mereka pelajari. Hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi berharga untuk penelitian lebih lanjut dan sumbangan dalam bidang akademis di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki manfaat yang penting dalam pemenuhan persyaratan akademis yang diperlukan untuk mendapatkan gelar Sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan.

### **1.5 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan rangkaian definisi yang memperjelas konsep tertentu dan menjelaskannya dengan penggunaan konsep-konsep lain atau definisi konstruksi yang berhubungan (Silalahi, 2012). Definisi konseptual ini memiliki peran penting dalam menggambarkan suatu konsep secara menyeluruh dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang esensi dan karakteristiknya.

Definisi ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi hubungan antara konsep yang sedang dibahas dengan konsep-konsep lain yang relevan, serta memperjelas bagaimana konsep tersebut dapat diartikan dan diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian, definisi konseptual berfungsi sebagai landasan teoritis yang kuat dalam pengembangan penelitian, pembahasan akademis, dan pemahaman yang lebih baik tentang suatu konsep tertentu.

### **1.5.1 Efektivitas Program**

Tingkat keberhasilan tindakan dalam program yang telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan awal program disebut efektivitas program. Keberhasilan suatu program ditentukan oleh seberapa baik program tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi terkait. Pendapat peserta program dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai efektivitas program, yang dapat dipastikan dengan membandingkan keluaran dengan tujuan program.

Dalam bukunya tentang keberhasilan program, Budiani mengklaim bahwa variabel-variabel berikut dapat digunakan untuk mengukur aspek-aspek yang dapat memengaruhi apakah suatu program berfungsi atau tidak: Ketepatan

1. Sasaran Program Tingkat keberhasilan peserta program dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan disebut ketepatan sasaran program.
2. Sosialisasi program mengacu pada kapasitas pelaksana program dalam menyosialisasikan program untuk menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaannya kepada masyarakat umum dan peserta program.
3. Sasaran program mengacu pada tingkat keselarasan hasil pelaksanaan program dengan sasaran program yang telah ditetapkan. Pemantauan Program: Setelah program dilaksanakan, pemantauan program merupakan upaya berkelanjutan yang dirancang untuk memberikan perhatian lebih lanjut kepada peserta. (Budiani,2007:20)

### **1.5.2 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**

Berdasarkan “Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, pengertian perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari perumahan baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana,

sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemerintah rumah layak huni.” Rumah adalah bangunan fisik yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi penghuninya, sarana bagi keluarga untuk tumbuh, representasi status dan martabat penghuninya, dan aset bagi pemiliknya. Sementara itu, perumahan adalah komponen lingkungan tempat tinggal yang dapat ditemukan di wilayah perkotaan atau pedesaan dan terdiri dari beberapa unit hunian dengan utilitas publik, infrastruktur, dan layanan pendukung (Wijaya, 2015).

Pertumbuhan dan pembangunan kawasan permukiman pada hakikatnya memiliki dua tujuan yang saling terkait, yaitu: terciptanya lingkungan yang melingkupi gaya hidup penghuninya dan tujuan pasif yang meliputi penyediaan prasarana dan fasilitas fisik. Berfungsi sebagai saluran pelaksanaan pembinaan dan pendidikan keluarga sekaligus memberikan rasa aman dan menjaga privasi sosial bagi setiap anggota keluarga. Diyakini bahwa ketahanan keluarga dapat dicapai dengan menyediakan rumah layak huni, salah satu kebutuhan pokok. Cukup sulit untuk menemukan rumah yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Ketidamampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni sangat berkorelasi dengan pendapatan dan tingkat keakraban mereka dengan operasional rumah tersebut. Proses rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni merupakan salah satu komponen pemberdayaan masyarakat miskin (RTLH). Begitu pula dengan persoalan prasarana dan fasilitas lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Masalah dapat timbul dari kondisi kemiskinan atau infrastruktur lingkungan yang tidak memadai. Masalah penduduk miskin yang menempati atau memiliki rumah tidak layak huni merupakan masalah yang kompleks. Oleh karena itu, diharapkan minat untuk menyelesaikan masalah ini akan semakin tumbuh dengan melibatkan semua aspek masyarakat (pemangku kepentingan), termasuk pemerintah daerah dan federal, perusahaan, LSM, dan masyarakat. Untuk memperbaiki RTLH, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Miskin mengalokasikan dana untuk rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH), yang dikombinasikan dengan pengembangan fasilitas dan infrastruktur lingkungan yang dapat diakses publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Azis Prasetyo et al., 2022).

### **1.5.3 Rehabilitasi**

Rehabilitasi mengacu pada upaya mengembalikan seseorang ke kondisi sebelum cacat (berdiri, dalam kondisi baik, dsb.) atau memperbaiki bagian tubuh yang rusak, antara lain, sehingga mereka dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Oleh karena itu, rehabilitasi sosial dapat dilihat sebagai upaya mengembalikan kondisi orang yang menghadapi kesulitan sosial ke kondisi sebelum masalah ketika kata rehabilitasi dan sosial digabungkan. Tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk membantu seseorang agar dapat kembali berintegrasi dengan keluarga, masyarakat, dan tempat kerja.

Salah satu inisiatif Pemerintah Daerah untuk menanggulangi kemiskinan adalah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yaitu upaya perbaikan rumah bagi masyarakat miskin atau tidak mampu yang kondisinya tidak layak huni. Renwick dan Friefeld mendefinisikan rehabilitasi sebagai proses multidisiplin yang bertujuan memulihkan fungsi fisik, emosional, kognitif, dan sosial seseorang sepanjang hidupnya. Hal ini dilakukan agar seseorang dapat melakukan tugas sehari-hari, bekerja, bersosialisasi, dan terlibat dalam kegiatan yang bermakna. Murtagh melanjutkan bahwa rehabilitasi adalah tindakan mengembalikan sesuatu ke kondisi yang dapat digunakan melalui penyesuaian atau modifikasi yang memungkinkan penggunaan jangka pendek yang efektif. (Kurniawan, 2019).

### **1.6 Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah efektivitas program yakni untuk melihat sejauh mana keberhasilan program ini yang dilihat dari pencapaian yang telah didapatkan. Pencapaian tersebut yaitu efektivitas program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bisa berjalan sesuai tujuan dan mampu untuk memberdayakan Keluarga Penerima.

Dalam bukunya tentang keberhasilan program, Budiani mengklaim bahwa variabel-variabel berikut dapat digunakan untuk mengukur aspek-aspek yang dapat memengaruhi apakah suatu program berfungsi atau tidak:

1. Ketepatan Sasaran: Hal ini mengacu pada seberapa dekat peserta program mematuhi sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Sosialisasi Program: Hal ini mengacu pada kapasitas pelaksana program untuk mensosialisasikan program guna menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaannya kepada khalayak sasaran dan masyarakat luas.
3. Tingkat kesesuaian hasil pelaksanaan program dengan sasaran program yang telah ditetapkan sebelumnya dikenal sebagai sasaran program.
4. Pemantauan program merupakan tindakan pasca-pelaksanaan yang dilakukan untuk memberikan perhatian lebih lanjut kepada peserta. (Budiani,2007)

### **1.7 Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam studi ini, digunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendetail serta mengidentifikasi fenomena atau permasalahan sosial yang terjadi di Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Melalui metode ini, peneliti akan mengumpulkan data yang menggambarkan secara objektif dan akurat mengenai karakteristik, kondisi, dan dinamika permasalahan sosial yang ada di wilayah tersebut. Penelitian ini juga akan berfokus pada analisis dan interpretasi data yang akan membantu memahami dan menjelaskan secara rinci fenomena sosial yang diteliti, termasuk faktor penyebab, implikasi, dan dampak yang ditimbulkannya. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan sosial di Kota Batu dan menjadi dasar bagi pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam penanganan masalah-masalah sosial di daerah tersebut.

#### **2. Subjek Penelitian**

Dalam rangka penelitian ini, para partisipan dipilih secara sengaja melalui metode *purposive sampling* yang memungkinkan pemilihan partisipan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang relevan terkait kebijakan Dinas Sosial dalam memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat

melalui Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Batu. Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki pengalaman atau keahlian di bidang pemberdayaan sosial atau mereka yang secara aktif terlibat dalam implementasi dan pengelolaan program RTLH. Mereka juga memiliki pemahaman mendalam tentang tujuan dan proses program serta dampak yang diharapkan dari program tersebut. Melalui metode purposive sampling, penelitian ini dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan representatif tentang pengalaman dan perspektif para pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan program RTLH di Kota Batu. Partisipan penelitian ini meliputi:

- a) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Batu. Partisipan ini dipilih karena mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan dan implementasi Program Rehabilitasi RTLH di Kota Batu. Sebagai pekerja di instansi yang bertanggung jawab terkait pemberdayaan sosial dan pelaksanaan program tersebut, mereka memiliki wawasan yang relevan.
- b) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang terlibat dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial di Kota Batu. Partisipan ini dipilih karena mereka terlibat langsung dalam implementasi program, dan oleh karena itu, memiliki pemahaman yang luas tentang proses pelaksanaan, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang telah dicapai.
- c) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima pelayanan dari Program Rehabilitasi Sosial di Kota Batu. Partisipan ini dipilih karena mereka dapat memberikan perspektif yang berharga mengenai efektivitas program dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka. Sebagai penerima langsung pelayanan tersebut, mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan.

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan dan program yang diteliti. Tujuan dari pemilihan informan secara sengaja ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam tentang Efektivitas Program Rehabilitasi RTLH di Kota Batu.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini, digunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Berikut ini akan dirinci lebih dalam:

#### a) Data Primer

1. Pengumpulan data langsung dari KPM melalui survei Peneliti dapat mengumpulkan data primer dengan melakukan survei langsung kepada KPM di Kota Batu Survei ini dapat melibatkan pengisian kuesioner oleh KPM untuk mendapatkan informasi tentang efektivitas program Rejabilitasi RTLH.
2. Wawancara mendalam Peneliti dapat melakukan wawancara mendalam dengan KPM yang memiliki pengalaman yang relevan Wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci tentang efektivitas program yang sudah dilaksanakan oleh dinas social ,harapan dan aspirasi mereka serta pandangan mereka terkait pelayanan sosial yang telah diberikan
3. Observasi langsung Peneliti dapat melakukan observasi langsung terhadap KPM di Kota Batu

#### b) Data Sekunder

1. Peneliti dapat mengkaji hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kota Batu atau wilayah sekitarnya yang terkait dengan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni . Informasi dari penelitian sebelumnya ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konteks topik penelitian.
2. Data statistik pemerintah: Pemerintah daerah atau lembaga terkait mungkin telah mengumpulkan data statistik mengenai jumlah KPM, profil mereka, dan pelayanan sosial yang diberikan.
3. Kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait menjadi sumber data sekunder yang berharga. Dokumen-dokumen tersebut menyediakan informasi tentang program-program pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial yang telah diterapkan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian tentang Program Rehabilitasi RTLH di Kota Batu, berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan:

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Peneliti dapat melakukan wawancara mendalam dengan KPM .
- b. Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian yaitu Rumah KPM yang sudah mendapatkan program bantuan RTLH.
- c. Analisis dokumen melibatkan pengumpulan dan penelitian dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang dapat dianalisis termasuk dokumen kebijakan, laporan penelitian terdahulu, catatan pelayanan sosial, atau data statistik yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Analisis dokumen dapat memberikan wawasan tentang konteks dan kebijakan yang berkaitan program Rehabilitasi RTLH .

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di kantor Dinas Sosial Kota Batu. Yang beralamat di Balai Kora Among Tani Gedung B Lantai 2, Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314, Indonesia. Penelitian ini diantisipasi untuk menghasilkan data yang lebih komprehensif yang mencakup pengamatan yang lebih jelas dan sederhana untuk memperoleh fakta objektif.

Dengan memilih Kota Batu sebagai lokasi penelitian, peneliti dapat mengkaji secara mendalam permasalahan kesejahteraan sosial yang dialami oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kota ini, serta pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih spesifik tentang konteks sosial, budaya, dan kebijakan yang berlaku di Kota Batu dalam konteks permasalahan sosial dan kesejahteraan sosial.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang melibatkan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) sering digunakan dalam penelitian kualitatif (Rijali, 2018). Berikut penjelasan lebih lanjut tentang setiap teknik:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*): Teknik ini melibatkan proses mereduksi, memilah, dan memfokuskan data yang telah dikumpulkan. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, atau informasi penting yang muncul dari data tersebut. Beberapa metode reduksi data yang umum digunakan meliputi:
- 1) Pengkodean: Membuat kategori atau label yang menggambarkan aspek-aspek yang relevan dari data, sehingga memudahkan dalam mengorganisasi dan menganalisisnya.
  - 2) Pemilihan kutipan atau contoh: Memilih kutipan-kutipan atau contoh-contoh yang representatif atau signifikan dari data untuk dianalisis lebih lanjut.
  - 3) Klasifikasi: Mengelompokkan data menjadi kategori atau subkategori yang relevan untuk mempermudah analisis.
- b. Penyajian Data (*Display Data*): Teknik ini digunakan untuk menyajikan data yang telah direduksi secara visual atau naratif. Penyajian data membantu dalam memvisualisasikan pola, tema, atau hubungan dalam data, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi. Beberapa bentuk penyajian data yang umum digunakan adalah:
- 1) Tabel: Menyajikan data dalam bentuk tabel atau matriks untuk memperlihatkan perbandingan atau pola dalam data.
  - 2) Diagram atau grafik: Menggunakan diagram batang, diagram lingkaran, atau grafik garis untuk memvisualisasikan distribusi atau hubungan dalam data.
  - 3) Kutipan atau cerita: Menggunakan kutipan langsung dari data atau cerita naratif untuk menggambarkan temuan atau kasus-kasus yang relevan.
- c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*): Teknik ini melibatkan interpretasi data yang telah direduksi dan disajikan untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Langkah ini mencakup:

- 1) Analisis tematik: Mengidentifikasi dan memahami tema-tema utama yang muncul dari data, serta menghubungkannya dengan pertanyaan penelitian.
- 2) Interpretasi dan penafsiran: Menganalisis data yang telah direduksi dan disajikan secara mendalam, mengidentifikasi hubungan antara temuan atau pola dalam data, dan memberikan penjelasan yang beralasan.
- 3) Verifikasi: Melibatkan proses membandingkan temuan atau interpretasi dengan data yang dikumpulkan untuk memastikan keabsahan dan keandalan analisis.

